

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan daerah menjadi sebuah elemen yang amat menentukan berhasil atau tidak independensi pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah pada masa ini. Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu elemen yang amat dicermati untuk menentukan tingkat kemandirian suatu wilayah dalam rangka otonomi daerah (Saleh, 2003).

Secara umum penerimaan pemerintah dibutuhkan guna mendanai pengeluaran pemerintah. Secara garis besar, penerimaan pemerintah bisa dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan

pajak, seperti penerimaan pemerintah yang diperoleh dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri.

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang (Siagian, 1985). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah diartikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah terdiri dari:

a) Pajak Provinsi

(1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor yaitu jenis pajak yang berasal dari penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu pajak dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor yaitu segala jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

(4) Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan yaitu pajak dari pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan merupakan segala air yang ada permukaan tanah, namun tidak termasuk di dalamnya air laut.

(5) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

b) Pajak Kabupaten/Kota

(1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengandipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

(2) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

(3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.

(4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang

berbentuk dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

(5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan permukaan bumi untuk dapat dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

(7) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

(8) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

(9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak dari kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dipakai guna kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi merupakan permukaan bumi yang terdiri dari tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman atau laut.

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang berasal dari perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan yaitu kejadian atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah dan bangunan yaitu hak atas tanah, termasuk didalamnya hak pengelolaan, beserta dengan bangunan diatasnya, sebagaimana yang dimaksudkan didalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yani, 2008). Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Wilayah kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk mencari potensi sumber-sumber penerimaannya melalui penetapan jenis retribusi selain yang telah ada, selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Retribusi untuk kabupaten/kota terdiri dari dua macam, yakni:

- (1) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, yang terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa usaha (Kadjatmiko, 2002).

Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota mencakup objek pendapatan antara lain: retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, dan lain-lain.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau disebut BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan pendapatan

daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga salah satu pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasi yang termasuk dalam pendapatan asli daerah meliputi beberapa hal, yaitu:

- a) Hak penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa/Giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai sebab dari penjualan, pengadaan barang maupun jasa oleh pemerintah daerah.

2. Pariwisata

a. Definisi Pariwisata

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu kata “pari” yang berarti banyak; berkali-kali; berputar-putar, dan kata “wisata” yang bermakna perjalanan; bepergian. Pariwisata dalam bahasa Inggris adalah “tour” yang diartikan dalam kamus sebagai perjalanan atau bepergian untuk kesenangan mengunjungi berbagai tempat yang menarik, atau kunjungan singkat atau kunjungan lewat suatu tempat (Spillane J. J., 2002).

Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata apabila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu:

- a. Harus bersifat sementara
- b. Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi paksaan
- c. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran

b. Jenis Pariwisata

Ada banyak jenis pariwisata yang ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, menurut James J, Spillane (1987: 28-31), pariwisata terdiri dari enam jenis yaitu:

1) Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Jenis pariwisata ini bertujuan untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan ketegangan saraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan kedamaian.

2) Pariwisata Untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan sebagai pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani serta menyegarkan keletihan.

3) Pariwisata Untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Jenis pariwisata ini ditandai dengan serangkaian motivasi seperti keinginan belajar di pusat riset, mempelajari adat-istiadat, mengunjungi monumen bersejarah dan peninggalan purbakala serta ikut festival seni musik.

4) Pariwisata Untuk Olah Raga (*Sports Tourism*)

Jenis pariwisata ini terdiri dari dua kategori, yaitu pariwisata olah raga besar seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games serta bagi mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti mendaki gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, rafting, dan memancing.

5) Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)

Jenis pariwisata ini biasanya dilakukan para pengusaha atau industrialis antara lain mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi teknis.

6) Pariwisata Untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)

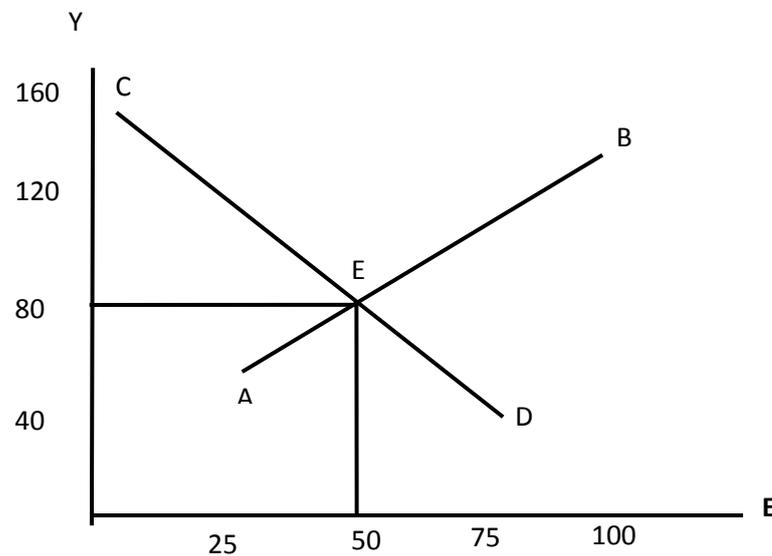
Jenis pariwisata ini berhubungan dengan konferensi, simposium, sidang dan seminar internasional.

c. Penawaran Pariwisata

Penawaran dalam pariwisata terdiri dari segala macam produk dan pelayanan/jasa yang dihasilkan oleh kelompok perusahaan industri pariwisata sebagai pemasok, yang ditawarkan baik kepada wisatawan

yang datang secara langsung atau yang membeli melalui Agen Perjalanan (AP) atau Biro Perjalanan Wisata (BPW) sebagai perantara (Yoeti, 2008).

Dimana harga yang diinginkan konsumen (wisatawan akan terbentuk apabila tingkat harga yang diinginkan sama dengan jumlah kamar yang tersedia seperti yang ditunjukkan oleh titik E (equilibrium), yaitu titik perpotongan kurva permintaan AB dan CD, seperti tampak pada Gambar 2.1



**Gambar 2.1 Titik Equilibrium Permintaan Kamar Hotel
(dalam ribuan)**

Sumber: (Yoeti, 2008)

Keseimbangan penawaran dan permintaan dikatakan stasioner dalam konteks bahwa sekali harga keseimbangan tercapai, biasanya cenderung untuk tetap dan tidak berubah selama permintaan dan penawaran tidak berubah. Dengan kata lain, apabila tidak terjadi pergeseran penawaran atau permintaan, maka tidak ada yang mempengaruhi harga akan mengalami perubahan.

Aspek-aspek penawaran pariwisata antara lain (Spillane J. J., 1987):

1) Proses Produksi Industri Pariwisata

Peningkatan pengembangan pariwisata sebagai industri ditunjang oleh berbagai macam usaha yang perlu untuk diatur secara terpadu, seperti:

- a. Promosi untuk memperkenalkan obyek wisata
- b. Transportasi yang lancar
- c. Kemudahan keimigrasian atau birokrasi
- d. Akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman
- e. Pemandu wisata yang cakap
- f. Penawaran barang dan jasa dengan mutu terjamin dan tarif harga yang wajar
- g. Pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik
- h. Kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup

2) Pentingnya Tenaga Kerja dan Penyediaan Lapangan Pekerjaan

Perkembangan pariwisata berpengaruh positif pada ekspansi kesempatan kerja. Karena tersedianya lapangan pekerjaan, maka akan menarik para pendatang baru dari luar daerah, hal tersebut adalah imbas dari berkembangnya suatu daerah pariwisata.

3) Penyediaan Infrastruktur/Sarana Prasarana

Karena adanya motivasi yang mendorong orang untuk melakukan perjalanan, maka akan menyebabkan permintaan-

permintaan yang berkaitan dengansarana prasarana perjalanan dan perhubungan, sarana akomodasi dan jasa-jasa, serta persediaan lainnya. Industri pariwisata juga membutuhkan prasarana ekonomi, antara lain jalan raya, jembatan, terminal, pelabuhan, lapangan udara. Begitu pula dengan prasarana yang bersifat *public utilities*, misalnya fasilitas olahraga dan rekreasi, pos dan telekomunikasi, *money changer*, perusahaan asuransi, periklanan, percetakan, dan banyak sektor perekonomian lainnya

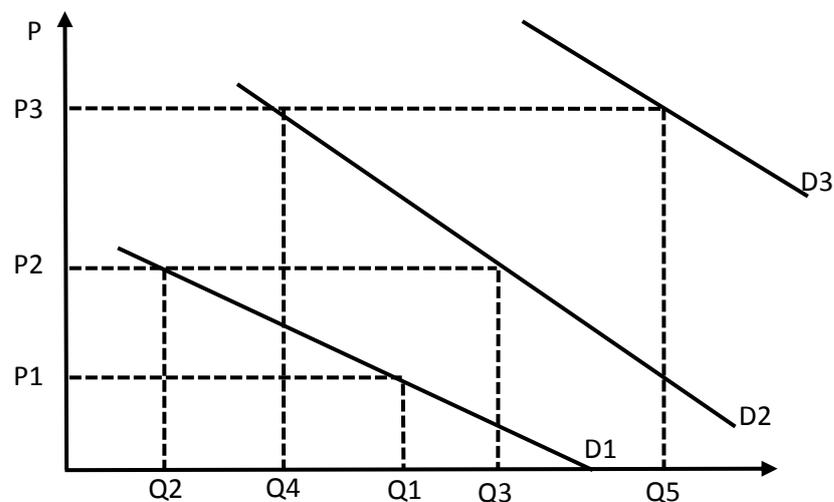
4) Penawaran Jasa Keuangan

Tata cara hidup yang tradisional dari sebuah kelompok masyarakat juga menjadi salah satu sumber yang amat penting untuk ditawarkan kepada para wisatawan. Bagaimana kebiasaan hidupnya, adat istiadatnya, seluruhnya menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke suatu daerah. Hal itu dapat dijadikan sebagai *event* yang bisa dijual oleh pemerintah daerah setempat (Yoeti, 2008).

d. Permintaan Pariwisata

Pariwisata dilihat sebagai suatu jenis usaha yang memiliki nilai ekonomi, maka pariwisata adalah sebagai suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambahan terhadap barang dan jasa sebagai satu kesatuan produk yang nyata (*real goods*) ataupun yang berupa jasa-jasa (*service*) yang dihasilkan melalui proses produksi. Disisi lain, pariwisata dianggap seperti suatu jasa yang diminati (*preferend goods or service*),

sebab lebih banyak dilakukan saat pendapatan meningkat. Ketika ada banyak keluarga yang menduduki kelompok pendapatan lebih tinggi, maka permintaan untuk berwisata akan meningkat lebih cepat dari pendapatan, dapat digambarkan dengan kurva permintaan individual Veblen seperti yang terlihat pada Gambar 2.2 (Lundberg, 1997)



Gambar 2.2 Kurva Permintaan Individual Veblen

Apabila harga yang ditetapkan adalah P_1 , maka produk yang terjual adalah Q_1 . Apabila harga ditingkatkan menjadi P_2 menurut kurva D_1 , maka harga jumlah barang yang dibeli akan turun menjadi Q_2 . Namun hal seperti ini tidak terjadi pada kurva Veblen, sebab konsumen mengerti pentingnya bagi produk tersebut dan kenyataannya konsumen justru akan membeli dalam jumlah yang banyak sebesar Q_3 . Oleh sebab itu, harga baru tersebut telah meningkatkan nilai kesenangan kualitas pelayanan atau pengalaman yang diberikan. Dalam hal ini, kurva permintaan bukan bergeser kebawah, akan tetapi bergeser ke D_2 sebagai akibat dari pengaruh permintaan Veblen.

Penurunan harga justru hanya akan meningkatkan sedikit jumlah barang yang dibeli, dimana pengaruhnya hanya menurut kurva permintaan baru D2. Ketika dinaikkan lagi menjadi P3, maka harga akan bergeser lagi, namun tindakan ini tidaklah membuat kurva permintaan mengalami penurunan menjadi Q4, akan tetapi justru terjadi peningkatan permintaan menjadi Q5.

e. Dampak Pariwisata

Salah satu motivasi utama sebuah negara mempromosikan dirinya sebagai negara dengan tujuan wisata adalah timbulnya kemajuan dalam ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang. Bersamaan dengan dampak lainnya, peningkatan ekonomi yang begitu pesat juga terjadi dengan berbagai keuntungan dan kerugian. Dampak besar pariwisata terlihat dari data *World Tourism Organization*, pada tahun 2000, 698 juta orang melakukan perjalanan ke luar negeri dan menghabiskan lebih dari 478 juta US dollar. Gabungan dari pendapatan pariwisata internasional dengan pendapatan transportasi, maka menghasilkan lebih dari 575 juta US dollar, yang membuat pariwisata menjadi penghasil ekspor terbesar di dunia diikuti oleh produk otomotif, bahan kimia, minyak bumi, dan makanan. Namun, banyak kerugian tersembunyi dari pariwisata yaitu, adanya dampak-dampak pada ekonomi yang tidak diharapkan oleh penduduk setempat. Seringkali keuntungan pariwisata sebuah negara maju lebih tinggi dari negara berkembang. Padahal negara berkembang lebih membutuhkan pendapatan tambahan, pekerjaan, dan peningkatan standar

hidup melalui pariwisata. Berdasarkan kenyataan tersebut, berbagai alasan muncul antara lain, karena adanya transfer besar-besaran pendapatan pariwisata dari negara tuan rumah, kemudian kurang diperhatikannya usaha dan produk dalam negeri.

Sebagai kegiatan atau industri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, pariwisata tentu akan memberikan dampak atau berpengaruh terhadap masyarakat, baik itu positif maupun negatif. Meskipun secara garis besar manfaat positif pariwisata lebih banyak dirasakan dibandingkan manfaat negatif, tidak ada salahnya untuk selalu berupaya menekan dampak negatif yang ada dan mengantisipasi dampak negatif yang mungkin terjadi, salah satu contohnya adalah mengembangkan pariwisata tanpa merusak tatanan yang ada, seperti mengubah fungsi lahan yang produktif seperti areal persawahan menjadi bangunan-bangunan untuk kepentingan pariwisata, biarkan pariwisata berjalan dengan apa yang sudah ada, biarkan wisatawan menikmati kearifan lokal yang ada, karena jika itu dibiarkan suatu saat terjadi ketergantungan masyarakat terhadap pariwisata yang tentunya tidak baik karena bagaimanapun juga harus kita sadari bahwa pariwisata adalah industri yang sangat rapuh.

Sektor pariwisata memberikan kontribusi kepada daerah lewat pajak daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pendapatan lain yang sah berupa pemberian hakatas tanah pemerintah. Dari pajak daerah itu sendiri, sektor pariwisata memberikan sumbangan berupa pajak

hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak minuman beralkohol serta pajak pemanfaatan air bawah tanah.

f. Peranan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Daerah

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Hubungan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Menurut Tambunan yang dikutip oleh Badrudin (2001), bahwa industri pariwisata yang menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah (*Community Tourism Development* atau CTD). Dengan mengembangkan CTD pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi resmi dari kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang meliputi hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, profesional convention organizer, pendidikan formal dan informal, pelatihan dan transportasi.

Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka akan semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tersebut, setidaknya untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal disana. Segala macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan

memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah (Austriana, 2005).

Belanja wisatawan di daerah tujuan wisatanya akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat secara langsung maupun tidak langsung melalui dampak berganda (*multiplier effect*) (Spillane J. J., 1987). Dimana pada daerah tersebut berkesempatan untuk menambah pendapatannya, dengan cara menjual barang dan jasa, seperti restoran, hotel, pramuwisata dan barang-barang souvenir. Oleh sebab itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan ke Provinsi Jawa Barat, maka pendapatan sektor pariwisata seluruh Provinsi Jawa Barat akan semakin meningkat pula.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Menurut Kusuma (2013) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali”, dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kedua variabel yaitu pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD, yang dilihat dari hasil uji t. Sedangkan dilihat dari kontribusinya, pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan PAD yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 16,6%.
2. Penelitian oleh Widiyanto (2013) dengan judul “Analisis Optimalisasi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya”, memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang dan untuk menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda, dengan penerimaan daerah sektor pariwisata sebagai variabel dependen dan jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, total pajak restoran, total pajak hotel, total pajak hiburan, dan total retribusi objek wisata sebagai variabel independennya. Berdasarkan metode analisis linear berganda bahwa ada pengaruh antara jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi objek wisata terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata, dimana hal ini di tunjukkan pada analisis koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa sebesar 56,9% penerimaan daerah sektor pariwisata dipengaruhi oleh variabel independen yang ada. Menurut hasil penelitian pada uji hipotesis menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang tidak berpengaruh terhadap penerimaan daerah Kota Semarang salah satu diantaranya adalah pajak hotel.

3. Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Anwar (2014) dengan judul “Peran Sektor Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan PAD di Kabupaten Malang Tahun 2008-2013” bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata di

Kabupaten Malang selama periode tahun 2008-2013. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis elastisitas dan proporsi. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan sektor pariwisata tidak banyak didalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 0,65% dari jumlah tenaga kerja yang sudah bekerja atau dikategorikan sebagai *inelastis*. Selain itu sektor pariwisata juga tidak memberikan kontribusi yang cukup besar selama kurun waktu 2008-2013 terhadap PAD Kabupaten Malang yaitu rata-rata hanya sebesar 3,39%.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Novitri (2014) dengan judul penelitian yaitu “Determinan Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi” bertujuan untuk menganalisis perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Jambi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Provinsi Jambi. Adapun metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel dengan spesifikasi penerimaan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi yang dipengaruhi oleh jumlah kamar hotel, PDRB sektor pariwisata, jumlah restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap, dan jumlah wisatawan. Hasil dari penelitian ini yaitu perkembangan pariwisata di Provinsi Jambi dari tahun 2000-2012 mulai membaik. Namun peran pemerintah dalam memperhatikan pariwisata di Provinsi Jambi sangat kurang. Selanjutnya, secara parsial jumlah kamar hotel tidak

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata, hal ini disebabkan peningkatan jumlah kamar penginapan tidak didasarkan atas meningkatnya jumlah wisatawan yang menggunakan jasa penginapan tersebut.

5. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shella (2014) dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Kota Banda Aceh”, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel jumlah wisatawan, objek wisata, jumlah hotel, dan lama tinggal wisatawan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata Kota Banda Aceh dengan nilai R^2 dan R masing-masing sebesar 0,984 dan 0,992. Dari keempat variabel tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Banda Aceh adalah variabel jumlah wisatawan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.
6. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kopec (2015) dengan judul “*Business Tendency Indicators in Tourism in the Malopolska Region (Poland) 2011-2014*”, pada penelitian tersebut menggambarkan sebuah survei mengenai tren bisnis di pasar pariwisata setempat, dimana dilakukan dibawah proyek observasi ekonomi Malopolska. Daerah Malopolska mendapatkan peringkat sebagai daerah yang paling menarik dari sektor pariwisata, sehingga diperlukan adanya pantauan dari segi ekonomi. Survei tersebut telah dilaksanakan setiap

triwulan sejak pertengahan tahun 2011, diantara sektor hotel, katering, dan industri yang berhubungan dengan pariwisata.

7. Penelitian oleh Gelashvili (2011) dengan judul "*Prospects of Rural Tourism Development in Georgia*", bertujuan untuk memahami tren pasar dan rekomendasi yang tepat untuk sektor pariwisata. Dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa data statistik dan praktik pemasaran yang kurang baik dilakukan oleh masyarakat miskin pada bagian negara Georgia yang belum berkembang. Oleh karena itu, sehubungan dengan pengembangan perspektif pariwisata dan analisis umum industri di negara ini, seperti isu potensi pariwisata negara, jenis pariwisata, dan permintaan tur yang semacam itu, haruslah ditekankan.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Toader (2013) dengan judul penelitian "*Network, Clusters and Innovation in Romanian Tourism*", bertujuan untuk mengetahui relevansi dari teori jaringan, cluster, dan bentuk inovasi pariwisata. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jaringan dan cluster dilihat oleh banyak ahli sebagai pendekatan inovatif dalam pengembangan sektor pariwisata. Didalam penelitian ini juga disampaikan contoh mengenai kerjasama sektor pariwisata Rumania di tingkat nasional, regional, dan lokal.
9. Menurut penelitian yang berjudul "*Concepts, Issues, and The Effectiveness of Alternative Tourism Management in Thailand: A Case Study of Plai Songkram Province*" yang dilakukan oleh Hounnaklang (2016), bertujuan untuk melakukan studi investigasi mengenai konsep

pariwisata alternatif, isu, dan manajemen di Thailand. Penelitian ini mengkaji proses partisipatif masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata rumahan, hambatan, dan faktor yang berkontribusi terhadap rusaknya manajemen, persepsi, dan kesadaran tuan rumah terhadap dampak pariwisata di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Metodologi penelitian yang digunakan mencakup tinjauan umum tentang kebijakan pariwisata saat ini dan perencanaan Provinsi Samut Songkram, survei pengunjung, serta observasi partisipatif.

10. Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Tawinunt (2015) dengan judul *“Service Quality and Customer Relationship Management Affecting Customer Retention of Long-Stay Travelers in the Thai Tourism Industry: A Sem Approach”*, diharapkan dapat membantu mendorong peluang strategi pasar yang dapat membantu memperoleh keunggulan sembari menguraikan ketrampilan manajemen. Penelitian ini berkaitan dengan analisis bagaimana mengembangkan kapasitas di pasar sementara meminimalkan biaya pemasaran dan biaya operasional dalam industri perjalanan Thailand.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama	Variabel	Jenis Analisis	Hasil	Perbedaan
Kusuma (2013) Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali	Independen: pajak daerah, retribusi daerah Dependen: PAD	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa kedua variabel yaitu pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD di Provinsi Bali	Studi kasus penelitian saat ini adalah Provinsi Jawa Barat dan alat analisis penelitian saat ini adalah regresi data panel
Widianto (2013) Analisis Optimalisasi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya	Independen: jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, total pajak restoran, total pajak hiburan, total retribusi objek wisata. Dependen: penerimaan daerah sektor pariwisata	Regresi Linier Berganda	Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, pajak hotel dan retribusi objek wisata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata.	Studi kasus penelitian saat ini adalah Provinsi Jawa Barat dan alat analisis penelitian saat ini adalah regresi data panel
Anwar (2014) Peran Sektor Pariwisata	Independen: tenaga kerja sektor pariwisata,	Analisis Elastisitas dan Proporsi	Kemampuan sektor pariwisata tidak banyak didalam penyerapan tenaga	Studi kasus penelitian saat ini adalah Provinsi Jawa Barat dan alat

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan PAD di Kabupaten Malang Tahun 2008-2013	pendapatan sektor pariwisata, kesempatan kerja sektor pariwisata Dependen: PAD		kerja yaitu sebesar 0,65% dari jumlah tenaga kerja yang sudah bekerja atau dikategorikan sebagai inelastis. Selain itu sektor pariwisata juga tidak memberikan kontribusi yang cukup besar selama kurun waktu 2008-2013 terhadap PAD Kabupaten Malang yaitu rata-rata hanya sebesar 3,39%	analisis penelitian saat ini adalah regresi data panel
Novitri (2014) Determinan Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	Independen: jumlah kamar hotel, PDRB sektor pariwisata, jumlah restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap, dan jumlah wisatawan Dependen: penerimaan daerah sektor pariwisata	Regresi Data Panel	Secara parsial jumlah kamar hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata, hal ini disebabkan peningkatan jumlah kamar penginapan tidak didasarkan atas meningkatnya jumlah wisatawan yang menggunakan jasa penginapan tersebut	Studi kasus penelitian saat ini adalah Provinsi Jawa Barat
Shella (2014) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan	Independen: jumlah wisatawan, jumlah objek wisata, jumlah hotel, lama tinggal	Regresi Linier Berganda	Secara simultan variabel jumlah wisatawan, objek wisata, jumlah hotel, dan lama tinggal wisatawan	Studi kasus penelitian saat ini adalah Provinsi Jawa Barat dan alat analisis penelitian saat

Daerah Sektor Pariwisata Kota Banda Aceh	wisatawan Dependen: penerimaan daerah sektor pariwisata		berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata Kota Banda Aceh.	ini adalah regresi data panel
Kopec (2015) <i>Business Tendency Indicators in Tourism in the Malopolska Region (Poland) 2011-2014</i>	Trend barometer (indikator kuantitatif), trend test (indikator kualitatif)	Uji survey kondisi bisnis dengan CATI (Computer Assisted Telephone Interview)	Hasil analisisnya menunjukkan bahwa periode terbaik untuk perusahaan dalam hal ini adalah pada pergantian tahun 2011/2012. Pada kuartal ke 3 di tahun 2011, indikator tren bisnis untuk situasi ekonomi perusahaan yang tercakup dalam survei tersebut adalah tertinggi dalam sejarah survei (+35,5%). Situasi secara bertahap mulai memburuk dari kuartal ke 3 di tahun 2012.	Studi kasus penelitian saat ini adalah Provinsi Jawa Barat dan alat analisis penelitian saat ini adalah regresi data panel
Gelashvili (2011) <i>Prospects of Rural Tourism Development in Georgia</i>	Budaya wisata tradisional dan wisata pedesaan	Identifikasi tren pasar	Georgia memiliki potensi wisata yang cukup signifikan: 102 resor kesehatan, 182 resor lokasi, 2400 sumber air mineral, 12000 monumen sejarah dan arsitektural.	Studi kasus penelitian saat ini adalah Provinsi Jawa Barat dan alat analisis penelitian saat ini adalah regresi data panel
Toader (2013)	Jaringan, cluster,	Analisis deskriptif	Jaringan dan cluster dilihat	Studi kasus penelitian

<i>Network, Clusters and Innovation in Romanian Tourism</i>	inovasi pariwisata		oleh banyak ahli sebagai pendekatan inovatif dalam pengembangan sektor pariwisata	saat ini adalah Provinsi Jawa Barat dan alat analisis penelitian saat ini adalah regresi data panel
Hounnaklang (2016) <i>Concepts, Issues, and The Effectiveness of Alternative Tourism Management in Thailand: A Case Study of Plai Songkram Province</i>	Kebijakan dan perencanaan pariwisata, survey sikap pengunjung, observasi partisipatif	Pendekatan triangulasi	Wisata homestay dapat menghasilkan karya dan pendapatan bagi penduduk lokal, namun ternyata biaya hidup dan harga tanah juga meningkat secara dramatis.	Studi kasus penelitian saat ini adalah Provinsi Jawa Barat dan alat analisis penelitian saat ini adalah regresi data panel
Tawinunt (2015) <i>Service Quality and Customer Relationship Management Affecting Customer Retention of Long-Stay Travelers in the Thai Tourism Industry: A Sem Approach</i>	Retensi pelanggan, Customer Relationship Management (CRM), kualitas layanan	Structural Equation Model (SEM)	Secara global, pariwisata menghasilkan sekitar 266 juta pekerjaan, yaitu 9,5% dari jumlah keseluruhan produk domestik bruto (PDB) dunia, dan merupakan industri senilai US \$ 7 triliun (THB 32,5 triliun). Oleh karena itu mudah untuk dipahami bagaimana industri pariwisata sangat penting bagi ekonomi Thailand dan pengaruhnya terhadap masyarakat Thailand	Studi kasus penelitian saat ini adalah Provinsi Jawa Barat dan alat analisis penelitian saat ini adalah regresi data panel

Pada penelitian saat ini, peneliti menambahkan variabel jumlah kendaraan bermotor umum dan PDRB sebagai variabel independen yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Hal tersebut dikarenakan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor umum, maka akan berdampak pada kemudahan akses para wisatawan menuju lokasi, sehingga akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Serta, PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Mengingat pengaruhnya yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat, maka peneliti tertarik untuk menambahkan variabel PDRB dalam penelitian ini.

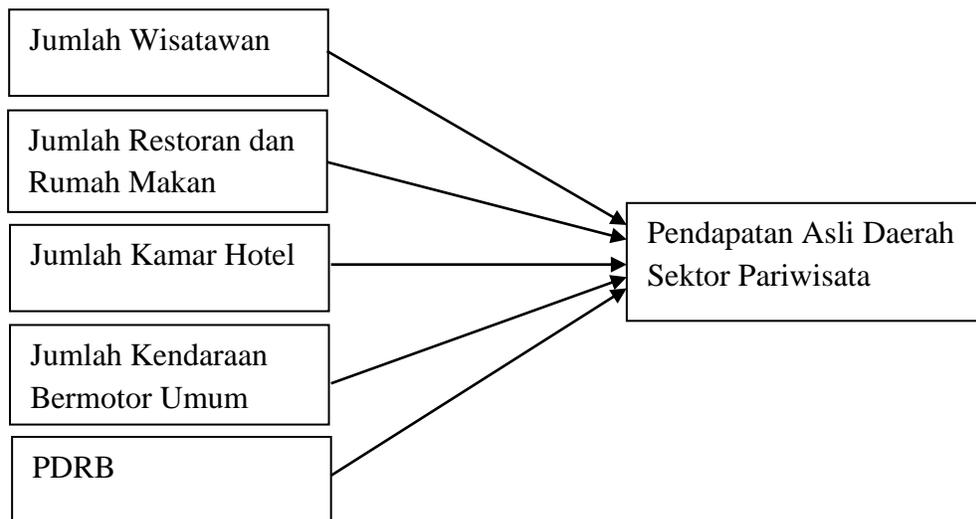
C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel jumlah wisatawan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
2. Variabel jumlah restoran dan rumah makan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
3. Variabel jumlah kamar hotel diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

4. Variabel jumlah kendaraan bermotor umum diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
5. Variabel PDRB diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

D. Model Penelitian



Gambar 2.3 Model Penelitian